

**BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA**

**KETENTUAN TEKNIS PELAKSANAAN  
PERATURAN PRESIDEN NOMOR 27 TAHUN 2011  
TENTANG PENYESUAIAN GAJI POKOK PEGAWAI NEGERI SIPIL  
MENURUT PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 25 TAHUN 2010  
KE DALAM GAJI POKOK PEGAWAI NEGERI SIPIL MENURUT  
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 11 TAHUN 2011**

**PERATURAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA  
NOMOR : 9 TAHUN 2011  
TANGGAL : 10 JUNI 2011**



## **BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA**

### **PERATURAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA NOMOR 9 TAHUN 2011**

#### **TENTANG**

#### **KETENTUAN TEKNIS PELAKSANAAN**

#### **PERATURAN PRESIDEN NOMOR 27 TAHUN 2011**

#### **TENTANG PENYESUAIAN GAJI POKOK PEGAWAI NEGERI SIPIL**

#### **MENURUT PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 25 TAHUN 2010**

#### **KE DALAM GAJI POKOK PEGAWAI NEGERI SIPIL MENURUT**

#### **PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 11 TAHUN 2011**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA,**

- Menimbang** : bahwa untuk kelancaran pelaksanaan penyesuaian gaji pokok Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2011 perlu menetapkan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara tentang Ketentuan Teknis Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2011 tentang Penyesuaian Gaji Pokok Pegawai Negeri Sipil Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2010 Ke Dalam Gaji Pokok Pegawai Negeri Sipil Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2011;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3980);
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3098), sebagaimana telah tiga belas kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 24);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 164);

4. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen, sebagaimana telah enam kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2005;
5. Keputusan Presiden Nomor 110 Tahun 2001 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Lembaga Pemerintah Non Departemen, sebagaimana telah tujuh kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2005;
6. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2011 tentang Penyesuaian Gaji Pokok Pegawai Negeri Sipil Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2010 Ke Dalam Gaji Pokok Pegawai Negeri Sipil Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2011;

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan** : **PERATURAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA TENTANG KETENTUAN TEKNIS PELAKSANAAN PERATURAN PRESIDEN NOMOR 27 TAHUN 2011 TENTANG PENYESUAIAN GAJI POKOK PEGAWAI NEGERI SIPIL MENURUT PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 25 TAHUN 2010 KE DALAM GAJI POKOK PEGAWAI NEGERI SIPIL MENURUT PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 11 TAHUN 2011.**

**Pasal 1**

- (1) Gaji pokok Pegawai Negeri Sipil menurut golongan ruang dan masa kerja golongan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2010, terhitung mulai tanggal 1 Januari 2011 disesuaikan dengan gaji pokok menurut golongan ruang dan masa kerja golongan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2011.
- (2) Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1), termasuk:
  - a. Calon Pegawai Negeri Sipil; dan
  - b. Pegawai Negeri Sipil yang diangkat menjadi Pejabat Negara.

**Pasal 2**

Penyesuaian gaji pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 didasarkan pada masa kerja golongan yang dimiliki Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan sampai dengan tanggal 31 Desember 2010 dengan cara sebagai berikut:

- a. gaji pokok lama golongan ruang I/a sampai dengan golongan ruang I/d pada lajur 3, disesuaikan menjadi sebagaimana tersebut pada lajur 4, Lampiran I-a Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara ini;
- b. gaji pokok lama golongan ruang II/a sampai dengan golongan ruang II/d pada lajur 3, disesuaikan menjadi sebagaimana tersebut pada lajur 4, Lampiran I-b Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara ini;
- c. gaji pokok lama golongan ruang III/a sampai dengan golongan ruang III/d pada lajur 3, disesuaikan menjadi sebagaimana tersebut pada lajur 4, Lampiran I-c Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara ini; atau
- d. gaji pokok lama golongan ruang IV/a sampai dengan golongan ruang IV/e pada lajur 3, disesuaikan menjadi sebagaimana tersebut pada lajur 4, Lampiran I-d Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara ini.

### Pasal 3

- (1) Penyesuaian gaji pokok Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, ditetapkan dengan keputusan Pejabat Pembina Kepegawaian masing-masing, dibuat menurut contoh sebagaimana tersebut dalam Lampiran I-e Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara ini.
- (2) Penyesuaian gaji pokok Pegawai Negeri Sipil yang dipekerjakan di luar instansi induknya ditetapkan dengan keputusan Pejabat Pembina Kepegawaian instansi induknya.
- (3) Penyesuaian gaji pokok Pegawai Negeri Sipil yang diperbantukan di luar instansi induknya, berlaku ketentuan sebagai berikut:
  - a. apabila pimpinan instansi yang menerima perbantuan berkedudukan sebagai Pejabat Pembina Kepegawaian, penyesuaian gaji pokok ditetapkan dengan keputusan Pejabat Pembina Kepegawaian instansi penerima perbantuan; atau
  - b. apabila pimpinan instansi yang menerima perbantuan tidak berkedudukan sebagai Pejabat Pembina Kepegawaian, penyesuaian gaji pokok ditetapkan dengan keputusan Pejabat Pembina Kepegawaian instansi induknya.

#### Pasal 4

- (1) Untuk mempercepat pelaksanaan penyesuaian gaji pokok Pegawai Negeri Sipil, Pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dapat mendelegasikan wewenangnya kepada pejabat struktural di lingkungannya paling rendah eselon III.
- (2) Pendelegasian wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan, dibuat menurut contoh sebagaimana tersebut dalam Lampiran I-f Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara ini.

#### Pasal 5

Keputusan pendelegasian wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 disampaikan kepada pejabat yang diberi delegasi dan tembusan disampaikan kepada:

- a. Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan;
- b. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara/Pemegang Kas (PEKAS)/Biro/Bagian Keuangan instansi yang bersangkutan; dan
- c. Pejabat lain yang dianggap perlu.

#### Pasal 6

Keputusan penyesuaian gaji pokok Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan dan tembusan disampaikan kepada:

- a. Kepala Badan Kepegawaian Negara, up. Deputi Bidang Informasi Kepegawaian;
- b. Kepala Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara yang bersangkutan;
- c. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara/Pemegang Kas (PEKAS)/Biro/Bagian Keuangan Daerah yang bersangkutan;
- d. Pembuat Daftar Gaji yang bersangkutan; dan
- e. Pejabat lain yang dianggap perlu.

#### Pasal 7

- (1) Pegawai Negeri Sipil yang dijatuhi hukuman disiplin berupa penundaan kenaikan gaji berkala, penyesuaian gaji pokok didasarkan atas masa kerja golongan sebelum dijatuhi hukuman disiplin.

- (2) Pegawai Negeri Sipil yang dijatuhi hukuman disiplin berupa penurunan pangkat setingkat lebih rendah, penyesuaian gaji pokok berlaku ketentuan sebagai berikut:
  - a. selama menjalani hukuman disiplin penyesuaian gaji pokok berdasarkan golongan ruang dan masa kerja golongan yang dimilikinya pada tanggal 31 Desember 2010; dan
  - b. setelah selesai menjalani hukuman disiplin penyesuaian gaji pokok berdasarkan gaji pokok baru sesuai golongan ruang dan masa kerja golongan yang dimilikinya.
- (3) Keputusan penyesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dibuat menurut contoh sebagaimana tersebut dalam Lampiran I-g Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara ini.

#### Pasal 8

Keputusan penyesuaian gaji pokok Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan dan tembusan disampaikan kepada:

- a. Kepala Badan Kepegawaian Negara, up. Deputi Bidang Informasi Kepegawaian;
- b. Kepala Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara yang bersangkutan;
- c. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara/Pemegang Kas (PEKAS)/Biro/Bagian Keuangan Daerah yang bersangkutan;
- d. Pembuat Daftar Gaji yang bersangkutan; dan
- e. Pejabat lain yang dianggap perlu.

#### Pasal 9

Pegawai Negeri Sipil yang sedang menjalani pemberhentian sementara atau sedang menerima uang tunggu, penyesuaian gaji pokok dilakukan dengan cara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. bagi yang sedang menjalani pemberhentian sementara, penyesuaian gaji pokok berdasarkan golongan ruang dan masa kerja golongan sampai dengan tanggal 31 Desember 2010; atau
- b. bagi penerima uang tunggu, penyesuaian gaji pokok berdasarkan golongan ruang dan masa kerja golongan pada saat yang bersangkutan diberhentikan sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan hak uang tunggu.

## Pasal 10

Penyesuaian gaji pokok Calon Pegawai Negeri Sipil dihitung 80% (delapan puluh persen) dari gaji pokok baru dengan masa kerja golongan yang dimiliki Calon Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan sampai dengan tanggal 31 Desember 2010, dengan cara sebagai berikut:

- a. 80% (delapan puluh persen) dari gaji pokok lama golongan ruang I/a dan golongan ruang I/c pada lajur 3, disesuaikan menjadi sebagaimana tersebut pada lajur 4, Lampiran II-a Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara ini;
- b. 80% (delapan puluh persen) dari gaji pokok lama golongan ruang II/a sampai dengan golongan ruang II/c pada lajur 3, disesuaikan menjadi sebagaimana tersebut pada lajur 4, Lampiran II-b Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara ini; atau
- c. 80% (delapan puluh persen) dari gaji pokok lama golongan ruang III/a sampai dengan golongan ruang III/c pada lajur 3, disesuaikan menjadi sebagaimana tersebut pada lajur 4, Lampiran II-c Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara ini.

## Pasal 11

Untuk mempermudah pelaksanaan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara ini, dilampirkan:

- a. Salinan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2011 tentang Perubahan Ketigabelas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil, sebagaimana tersebut dalam Lampiran III Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara ini; dan
- b. Salinan Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2011 tentang Penyesuaian Gaji Pokok Pegawai Negeri Sipil Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2010 Ke Dalam Gaji Pokok Pegawai Negeri Sipil Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2011, sebagaimana tersebut dalam Lampiran IV Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara ini.

## Pasal 12

Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan mempunyai daya laku surut sejak 1 Januari 2011.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 10 Juni 2011

KEPALA  
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA,



EDY TOPO ASHARI

LAMPIRAN I-a PERATURAN KEPALA BADAN  
KEPEGAWAIAN NEGARA  
NOMOR : 9 TAHUN 2011  
TANGGAL : 10 JUNI 2011

DAFTAR PENYESUAIAN GAJI POKOK PEGAWAI NEGERI SIPIL  
MENURUT PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 25 TAHUN 2010  
KE DALAM PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 11 TAHUN 2011  
GOLONGAN RUANG I/a SAMPAI DENGAN GOLONGAN RUANG I/d  
GOLONGAN RUANG I/a

NO	MASA KERJA GOLONGAN DALAM	GAJI POKOK BERDASARKAN LAMPIRAN	
		PP NO. 25 TAHUN 2010 (Rp)	PP NO. 11 TAHUN 2011 (Rp)
1	2	3	4
1	0	1.095.000	1.175.000
2	1	1.095.000	1.175.000
3	2	1.121.900	1.207.500
4	3	1.121.900	1.207.500
5	4	1.149.400	1.240.900
6	5	1.149.400	1.240.900
7	6	1.177.700	1.275.300
8	7	1.177.700	1.275.300
9	8	1.206.600	1.310.500
10	9	1.206.600	1.310.500
11	10	1.236.200	1.346.800
12	11	1.236.200	1.346.800
13	12	1.266.600	1.384.000
14	13	1.266.600	1.384.000
15	14	1.297.700	1.422.300
16	15	1.297.700	1.422.300
17	16	1.329.500	1.461.600
18	17	1.329.500	1.461.600
19	18	1.362.200	1.502.000
20	19	1.362.200	1.502.000
21	20	1.395.600	1.543.600
22	21	1.395.600	1.543.600
23	22	1.429.900	1.586.300
24	23	1.429.900	1.586.300
25	24	1.465.000	1.630.100
26	25	1.465.000	1.630.100
27	26	1.500.900	1.675.200
28	27	1.500.900	1.675.200

## GOLONGAN RUANG I/b

NO	MASA KERJA GOLONGAN DALAM	GAJI POKOK BERDASARKAN LAMPIRAN	
		PP NO. 25 TAHUN 2010 (Rp)	PP NO. 11 TAHUN 2011 (Rp)
1	2	3	4
1	0		
2	1		
3	2		
4	3	1.183.700	1.276.000
5	4	1.183.700	1.276.000
6	5	1.212.800	1.311.300
7	6	1.212.800	1.311.300
8	7	1.242.600	1.347.600
9	8	1.242.600	1.347.600
10	9	1.273.100	1.384.800
11	10	1.273.100	1.384.800
12	11	1.304.300	1.423.100
13	12	1.304.300	1.423.100
14	13	1.336.300	1.462.500
15	14	1.336.300	1.462.500
16	15	1.369.100	1.503.000
17	16	1.369.100	1.503.000
18	17	1.402.800	1.544.500
19	18	1.402.800	1.544.500
20	19	1.437.200	1.587.200
21	20	1.437.200	1.587.200
22	21	1.472.500	1.631.100
23	22	1.472.500	1.631.100
24	23	1.508.600	1.676.200
25	24	1.508.600	1.676.200
26	25	1.545.700	1.722.600
27	26	1.545.700	1.722.600
28	27	1.583.600	1.770.200

## GOLONGAN RUANG I/c

NO	MASA KERJA GOLONGAN DALAM	GAJI POKOK BERDASARKAN LAMPIRAN	
		PP NO.25 TAHUN 2010 (Rp)	PP NO 11 TAHUN 2011 (Rp)
1	2	3	4
1	0		
2	1		
3	2		
4	3	1.233.800	1.330.000
5	4	1.233.800	1.330.000
6	5	1.264.100	1.366.800
7	6	1.264.100	1.366.800
8	7	1.295.100	1.404.600
9	8	1.295.100	1.404.600
10	9	1.326.900	1.443.400
11	10	1.326.900	1.443.400
12	11	1.359.500	1.483.300
13	12	1.359.500	1.483.300
14	13	1.392.900	1.524.400
15	14	1.392.900	1.524.400
16	15	1.427.100	1.566.500
17	16	1.427.100	1.566.500
18	17	1.462.100	1.609.900
19	18	1.462.100	1.609.900
20	19	1.498.000	1.654.400
21	20	1.498.000	1.654.400
22	21	1.534.800	1.700.100
23	22	1.534.800	1.700.100
24	23	1.572.500	1.747.100
25	24	1.572.500	1.747.100
26	25	1.611.100	1.795.500
27	26	1.611.100	1.795.500
28	27	1.650.600	1.845.100

## GOLONGAN RUANG I/d

NO	MASA KERJA GOLONGAN DALAM TAHUN	GAJI POKOK BERDASARKAN LAMPIRAN	
		PP NO. 25 TAHUN 2010 (Rp)	PP NO. 11 TAHUN 2011 (Rp)
1	2	3	4
1	0		
2	1		
3	2		
4	3	1.286.000	1.386.300
5	4	1.286.000	1.386.300
6	5	1.317.500	1.424.600
7	6	1.317.500	1.424.600
8	7	1.349.900	1.464.000
9	8	1.349.900	1.464.000
10	9	1.383.000	1.504.500
11	10	1.383.000	1.504.500
12	11	1.417.000	1.546.100
13	12	1.417.000	1.546.100
14	13	1.451.800	1.588.900
15	14	1.451.800	1.588.900
16	15	1.487.400	1.632.800
17	16	1.487.400	1.632.800
18	17	1.523.900	1.677.900
19	18	1.523.900	1.677.900
20	19	1.561.400	1.724.400
21	20	1.561.400	1.724.400
22	21	1.599.700	1.772.000
23	22	1.599.700	1.772.000
24	23	1.639.000	1.821.100
25	24	1.639.000	1.821.100
26	25	1.679.200	1.871.400
27	26	1.679.200	1.871.400
28	27	1.720.400	1.923.200



KEPALA  
BADAN KEREGAWAIAN NEGARA,

EDY TOPO ASHARI

LAMPIRAN I-b PERATURAN KEPALA BADAN  
KEPEGAWAIAN NEGARA  
NOMOR : 9 TAHUN 2011  
TANGGAL : 10 JUNI 2011

DAFTAR PENYESUAIAN GAJI POKOK PEGAWAI NEGERI SIPIL  
MENURUT PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 25 TAHUN 2010  
KE DALAM PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 11 TAHUN 2011  
GOLONGAN RUANG II/a SAMPAI DENGAN GOLONGAN RUANG II/d  
GOLONGAN RUANG II/a

NO	MASA KERJA GOLONGAN DALAM	GAJI POKOK BERDASARKAN LAMPIRAN	
		PP NO. 25 TAHUN 2010 (Rp)	PP NO. 11 TAHUN 2011 (Rp)
1	2	3	4
1	0	1.390.100	1.505.400
2	1	1.407.200	1.526.200
3	2	1.407.200	1.526.200
4	3	1.441.800	1.568.400
5	4	1.441.800	1.568.400
6	5	1.477.100	1.611.800
7	6	1.477.100	1.611.800
8	7	1.513.400	1.656.400
9	8	1.513.400	1.656.400
10	9	1.550.600	1.702.200
11	10	1.550.600	1.702.200
12	11	1.588.600	1.749.300
13	12	1.588.600	1.749.300
14	13	1.627.600	1.797.600
15	14	1.627.600	1.797.600
16	15	1.667.600	1.847.300
17	16	1.667.600	1.847.300
18	17	1.708.600	1.898.400
19	18	1.708.600	1.898.400
20	19	1.750.500	1.950.900
21	20	1.750.500	1.950.900
22	21	1.793.500	2.004.900
23	22	1.793.500	2.004.900
24	23	1.837.500	2.060.300
25	24	1.837.500	2.060.300
26	25	1.882.600	2.117.300
27	26	1.882.600	2.117.300
28	27	1.928.800	2.175.900
29	28	1.928.800	2.175.900
30	29	1.976.200	2.236.100
31	30	1.976.200	2.236.100
32	31	2.024.700	2.297.900
33	32	2.024.700	2.297.900
34	33	2.074.400	2.361.400

## GOLONGAN RUANG II/b

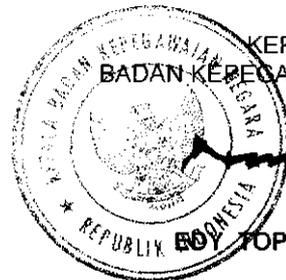
NO	MASA KERJA GOLONGAN DALAM	GAJI POKOK BERDASARKAN LAMPIRAN	
		PP NO. 25 TAHUN 2010 (Rp)	PP NO. 11 TAHUN 2011 (Rp)
1	2	3	4
1	0		
2	1		
3	2		
4	3	1.502.700	1.634.800
5	4	1.502.700	1.634.800
6	5	1.539.600	1.680.000
7	6	1.539.600	1.680.000
8	7	1.577.400	1.726.400
9	8	1.577.400	1.726.400
10	9	1.616.200	1.774.200
11	10	1.616.200	1.774.200
12	11	1.655.800	1.823.200
13	12	1.655.800	1.823.200
14	13	1.696.500	1.873.700
15	14	1.696.500	1.873.700
16	15	1.738.100	1.925.500
17	16	1.738.100	1.925.500
18	17	1.780.800	1.978.700
19	18	1.780.800	1.978.700
20	19	1.824.500	2.033.500
21	20	1.824.500	2.033.500
22	21	1.869.300	2.089.700
23	22	1.869.300	2.089.700
24	23	1.915.200	2.147.500
25	24	1.915.200	2.147.500
26	25	1.962.300	2.206.900
27	26	1.962.300	2.206.900
28	27	2.010.400	2.267.900
29	28	2.010.400	2.267.900
30	29	2.059.800	2.330.600
31	30	2.059.800	2.330.600
32	31	2.110.400	2.395.100
33	32	2.110.400	2.395.100
34	33	2.162.200	2.461.300

## GOLONGAN RUANG II/c

NO	MASA KERJA GOLONGAN DALAM	GAJI POKOK BERDASARKAN LAMPIRAN	
		PP NO. 25 TAHUN 2010 (Rp)	PP NO. 11 TAHUN 2011 (Rp)
1	2	3	4
1	0		
2	1		
3	2		
4	3	1.566.300	1.703.900
5	4	1.566.300	1.703.900
6	5	1.604.800	1.751.000
7	6	1.604.800	1.751.000
8	7	1.644.200	1.799.500
9	8	1.644.200	1.799.500
10	9	1.684.500	1.849.200
11	10	1.684.500	1.849.200
12	11	1.725.900	1.900.400
13	12	1.725.900	1.900.400
14	13	1.768.300	1.952.900
15	14	1.768.300	1.952.900
16	15	1.811.700	2.006.900
17	16	1.811.700	2.006.900
18	17	1.856.200	2.062.400
19	18	1.856.200	2.062.400
20	19	1.901.700	2.119.500
21	20	1.901.700	2.119.500
22	21	1.948.400	2.178.100
23	22	1.948.400	2.178.100
24	23	1.996.300	2.238.300
25	24	1.996.300	2.238.300
26	25	2.045.300	2.300.200
27	26	2.045.300	2.300.200
28	27	2.095.500	2.363.900
29	28	2.095.500	2.363.900
30	29	2.146.900	2.429.200
31	30	2.146.900	2.429.200
32	31	2.199.600	2.496.400
33	32	2.199.600	2.496.400
34	33	2.253.600	2.565.400

## GOLONGAN RUANG II/d

NO	MASA KERJA GOLONGAN DALAM	GAJI POKOK BERDASARKAN LAMPIRAN	
		PP NO. 25 TAHUN 2010 (Rp)	PP NO. 11 TAHUN 2011 (Rp)
1	2	3	4
1	0		
2	1		
3	2		
4	3	1.632.600	1.776.000
5	4	1.632.600	1.776.000
6	5	1.672.600	1.825.100
7	6	1.672.600	1.825.100
8	7	1.713.700	1.875.600
9	8	1.713.700	1.875.600
10	9	1.755.800	1.927.400
11	10	1.755.800	1.927.400
12	11	1.798.900	1.980.800
13	12	1.798.900	1.980.800
14	13	1.843.100	2.035.500
15	14	1.843.100	2.035.500
16	15	1.888.300	2.091.800
17	16	1.888.300	2.091.800
18	17	1.934.700	2.149.700
19	18	1.934.700	2.149.700
20	19	1.982.200	2.209.100
21	20	1.982.200	2.209.100
22	21	2.030.800	2.270.200
23	22	2.030.800	2.270.200
24	23	2.080.700	2.333.000
25	24	2.080.700	2.333.000
26	25	2.131.800	2.397.500
27	26	2.131.800	2.397.500
28	27	2.184.100	2.463.800
29	28	2.184.100	2.463.800
30	29	2.237.700	2.532.000
31	30	2.237.700	2.532.000
32	31	2.292.700	2.602.000
33	32	2.292.700	2.602.000
34	33	2.349.000	2.674.000


 KEPALA  
 BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA,  
 TOPO ASHARI

LAMPIRAN I-c PERATURAN KEPALA BADAN  
KEPEGAWAIAN NEGARA  
NOMOR : 9 TAHUN 2011  
TANGGAL : 10 JUNI 2011

DAFTAR PENYESUAIAN GAJI POKOK PEGAWAI NEGERI SIPIL  
MENURUT PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 25 TAHUN 2010  
KE DALAM PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 11 TAHUN 2011

GOLONGAN RUANG III/a SAMPAI DENGAN GOLONGAN RUANG III/d

GOLONGAN RUANG III/a

NO	MASA KERJA GOLONGAN DALAM	GAJI POKOK BERDASARKAN LAMPIRAN	
		PP NO. 25 TAHUN 2010 (Rp)	PP NO. 11 TAHUN 2011 (Rp)
1	2	3	4
1	0	1.743.400	1.902.300
2	1	1.743.400	1.902.300
3	2	1.786.200	1.954.900
4	3	1.786.200	1.954.900
5	4	1.830.100	2.009.000
6	5	1.830.100	2.009.000
7	6	1.875.000	2.064.500
8	7	1.875.000	2.064.500
9	8	1.921.000	2.121.600
10	9	1.921.000	2.121.600
11	10	1.968.200	2.180.300
12	11	1.968.200	2.180.300
13	12	2.016.500	2.240.600
14	13	2.016.500	2.240.600
15	14	2.066.000	2.302.600
16	15	2.066.000	2.302.600
17	16	2.116.700	2.366.300
18	17	2.116.700	2.366.300
19	18	2.168.700	2.431.700
20	19	2.168.700	2.431.700
21	20	2.222.000	2.499.000
22	21	2.222.000	2.499.000
23	22	2.276.500	2.568.100
24	23	2.276.500	2.568.100
25	24	2.332.400	2.639.100
26	25	2.332.400	2.639.100
27	26	2.389.700	2.712.100
28	27	2.389.700	2.712.100
29	28	2.448.300	2.787.100
30	29	2.448.300	2.787.100
31	30	2.508.400	2.864.200
32	31	2.508.400	2.864.200
33	32	2.570.000	2.943.400

## GOLONGAN RUANG III/b

NO	MASA KERJA GOLONGAN DALAM	GAJI POKOK BERDASARKAN LAMPIRAN	
		PP NO. 25 TAHUN 2010 (Rp)	PP NO. 11 TAHUN 2011 (Rp)
1	2	3	4
1	0	1.817.100	1.982.800
2	1	1.817.100	1.982.800
3	2	1.861.800	2.037.600
4	3	1.861.800	2.037.600
5	4	1.907.500	2.094.000
6	5	1.907.500	2.094.000
7	6	1.954.300	2.151.900
8	7	1.954.300	2.151.900
9	8	2.002.300	2.211.400
10	9	2.002.300	2.211.400
11	10	2.051.400	2.272.500
12	11	2.051.400	2.272.500
13	12	2.101.800	2.335.400
14	13	2.101.800	2.335.400
15	14	2.153.400	2.400.000
16	15	2.153.400	2.400.000
17	16	2.206.300	2.466.400
18	17	2.206.300	2.466.400
19	18	2.260.400	2.534.600
20	19	2.260.400	2.534.600
21	20	2.315.900	2.604.700
22	21	2.315.900	2.604.700
23	22	2.372.800	2.676.700
24	23	2.372.800	2.676.700
25	24	2.431.100	2.750.700
26	25	2.431.100	2.750.700
27	26	2.490.700	2.826.800
28	27	2.490.700	2.826.800
29	28	2.551.900	2.905.000
30	29	2.551.900	2.905.000
31	30	2.614.600	2.985.300
32	31	2.614.600	2.985.300
33	32	2.678.700	3.067.900

## GOLONGAN RUANG III/c

NO	MASA KERJA GOLONGAN DALAM	GAJI POKOK BERDASARKAN LAMPIRAN	
		PP NO. 25 TAHUN 2010 (Rp)	PP NO. 11 TAHUN 2011 (Rp)
1	2	3	4
1	0	1.894.000	2.066.600
2	1	1.894.000	2.066.600
3	2	1.940.500	2.123.800
4	3	1.940.500	2.123.800
5	4	1.988.100	2.182.500
6	5	1.988.100	2.182.500
7	6	2.037.000	2.242.900
8	7	2.037.000	2.242.900
9	8	2.087.000	2.304.900
10	9	2.087.000	2.304.900
11	10	2.138.200	2.368.700
12	11	2.138.200	2.368.700
13	12	2.190.700	2.434.200
14	13	2.190.700	2.434.200
15	14	2.244.500	2.501.500
16	15	2.244.500	2.501.500
17	16	2.299.600	2.570.700
18	17	2.299.600	2.570.700
19	18	2.356.100	2.641.800
20	19	2.356.100	2.641.800
21	20	2.413.900	2.714.800
22	21	2.413.900	2.714.800
23	22	2.473.200	2.789.900
24	23	2.473.200	2.789.900
25	24	2.533.900	2.867.100
26	25	2.533.900	2.867.100
27	26	2.596.100	2.946.400
28	27	2.596.100	2.946.400
29	28	2.659.800	3.027.800
30	29	2.659.800	3.027.800
31	30	2.725.200	3.111.600
32	31	2.725.200	3.111.600
33	32	2.792.100	3.197.600

## GOLONGAN RUANG III/d

NO	MASA KERJA GOLONGAN DALAM	GAJI POKOK BERDASARKAN LAMPIRAN	
		PP NO. 25 TAHUN 2010 (Rp)	PP NO. 11 TAHUN 2011 (Rp)
1	2	3	4
1	0	1.974.100	2.154.100
2	1	1.974.100	2.154.100
3	2	2.022.600	2.213.600
4	3	2.022.600	2.213.600
5	4	2.072.200	2.274.900
6	5	2.072.200	2.274.900
7	6	2.123.100	2.337.800
8	7	2.123.100	2.337.800
9	8	2.175.300	2.402.400
10	9	2.175.300	2.402.400
11	10	2.228.700	2.468.900
12	11	2.228.700	2.468.900
13	12	2.283.400	2.537.100
14	13	2.283.400	2.537.100
15	14	2.339.400	2.607.300
16	15	2.339.400	2.607.300
17	16	2.396.900	2.679.400
18	17	2.396.900	2.679.400
19	18	2.455.700	2.753.500
20	19	2.455.700	2.753.500
21	20	2.516.000	2.829.700
22	21	2.516.000	2.829.700
23	22	2.577.800	2.907.900
24	23	2.577.800	2.907.900
25	24	2.641.100	2.988.400
26	25	2.641.100	2.988.400
27	26	2.705.900	3.071.000
28	27	2.705.900	3.071.000
29	28	2.772.400	3.155.900
30	29	2.772.400	3.155.900
31	30	2.840.400	3.243.200
32	31	2.840.400	3.243.200
33	32	2.910.200	3.332.900



KEPALA  
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA,

TOPO ASHARI

LAMPIRAN I-d PERATURAN KEPALA BADAN  
KEPEGAWAIAN NEGARA  
NOMOR : 9 TAHUN 2011  
TANGGAL : 10 JUNI 2011

DAFTAR PENYESUAIAN GAJI POKOK PEGAWAI NEGERI SIPIL  
MENURUT PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 25 TAHUN 2010  
KE DALAM PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 11 TAHUN 2011  
GOLONGAN RUANG IV/a SAMPAI DENGAN GOLONGAN RUANG IV/e  
GOLONGAN RUANG IV/a

NO	MASA KERJA GOLONGAN DALAM	GAJI POKOK BERDASARKAN LAMPIRAN	
		PP NO. 25 TAHUN 2010 (Rp)	PP NO. 11 TAHUN 2011 (Rp)
1	2	3	4
1	0	2.057.600	2.245.200
2	1	2.057.600	2.245.200
3	2	2.108.100	2.307.300
4	3	2.108.100	2.307.300
5	4	2.159.900	2.371.100
6	5	2.159.900	2.371.100
7	6	2.212.900	2.436.700
8	7	2.212.900	2.436.700
9	8	2.267.300	2.504.000
10	9	2.267.300	2.504.000
11	10	2.322.900	2.573.300
12	11	2.322.900	2.573.300
13	12	2.380.000	2.644.500
14	13	2.380.000	2.644.500
15	14	2.438.400	2.717.600
16	15	2.438.400	2.717.600
17	16	2.498.300	2.792.800
18	17	2.498.300	2.792.800
19	18	2.559.600	2.870.000
20	19	2.559.600	2.870.000
21	20	2.622.400	2.949.400
22	21	2.622.400	2.949.400
23	22	2.686.800	3.030.900
24	23	2.686.800	3.030.900
25	24	2.752.800	3.114.800
26	25	2.752.800	3.114.800
27	26	2.820.400	3.200.900
28	27	2.820.400	3.200.900
29	28	2.889.600	3.289.400
30	29	2.889.600	3.289.400
31	30	2.960.600	3.380.400
32	31	2.960.600	3.380.400
33	32	3.033.300	3.473.900

## GOLONGAN RUANG IV/b

NO	MASA KERJA GOLONGAN DALAM	GAJI POKOK BERDASARKAN LAMPIRAN	
		PP NO. 25 TAHUN 2010 (Rp)	PP NO. 11 TAHUN 2011 (Rp)
1	2	3	4
1	0	2.144.700	2.340.200
2	1	2.144.700	2.340.200
3	2	2.197.300	2.404.900
4	3	2.197.300	2.404.900
5	4	2.251.300	2.471.400
6	5	2.251.300	2.471.400
7	6	2.306.500	2.539.700
8	7	2.306.500	2.539.700
9	8	2.363.200	2.610.000
10	9	2.363.200	2.610.000
11	10	2.421.200	2.682.100
12	11	2.421.200	2.682.100
13	12	2.480.600	2.756.300
14	13	2.480.600	2.756.300
15	14	2.541.500	2.832.600
16	15	2.541.500	2.832.600
17	16	2.603.900	2.910.900
18	17	2.603.900	2.910.900
19	18	2.667.900	2.991.400
20	19	2.667.900	2.991.400
21	20	2.733.400	3.074.100
22	21	2.733.400	3.074.100
23	22	2.800.500	3.159.100
24	23	2.800.500	3.159.100
25	24	2.869.200	3.246.500
26	25	2.869.200	3.246.500
27	26	2.939.700	3.336.300
28	27	2.939.700	3.336.300
29	28	3.011.900	3.428.600
30	29	3.011.900	3.428.600
31	30	3.085.800	3.523.400
32	31	3.085.800	3.523.400
33	32	3.161.600	3.620.800

## GOLONGAN RUANG IV/c

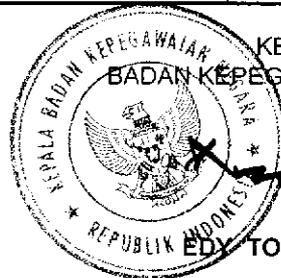
NO	MASA KERJA GOLONGAN DALAM	GAJI POKOK BERDASARKAN LAMPIRAN	
		PP NO. 25 TAHUN 2010 (Rp)	PP NO. 11 TAHUN 2011 (Rp)
1	2	3	4
1	0	2.235.400	2.439.100
2	1	2.235.400	2.439.100
3	2	2.290.300	2.506.600
4	3	2.290.300	2.506.600
5	4	2.346.500	2.575.900
6	5	2.346.500	2.575.900
7	6	2.404.100	2.647.200
8	7	2.404.100	2.647.200
9	8	2.463.100	2.720.400
10	9	2.463.100	2.720.400
11	10	2.523.600	2.795.600
12	11	2.523.600	2.795.600
13	12	2.585.600	2.872.900
14	13	2.585.600	2.872.900
15	14	2.649.000	2.952.400
16	15	2.649.000	2.952.400
17	16	2.714.100	3.034.000
18	17	2.714.100	3.034.000
19	18	2.780.700	3.117.900
20	19	2.780.700	3.117.900
21	20	2.849.000	3.204.200
22	21	2.849.000	3.204.200
23	22	2.918.900	3.292.800
24	23	2.918.900	3.292.800
25	24	2.990.600	3.383.800
26	25	2.990.600	3.383.800
27	26	3.064.000	3.477.400
28	27	3.064.000	3.477.400
29	28	3.139.300	3.573.600
30	29	3.139.300	3.573.600
31	30	3.216.300	3.672.400
32	31	3.216.300	3.672.400
33	32	3.295.300	3.774.000

## GOLONGAN RUANG IV/d

NO	MASA KERJA GOLONGAN DALAM	GAJI POKOK BERDASARKAN LAMPIRAN	
		PP NO. 25 TAHUN 2010 (Rp)	PP NO. 11 TAHUN 2011 (Rp)
1	2	3	4
1	0	2.329.900	2.542.300
2	1	2.329.900	2.542.300
3	2	2.387.100	2.612.600
4	3	2.387.100	2.612.600
5	4	2.445.800	2.684.900
6	5	2.445.800	2.684.900
7	6	2.505.800	2.759.100
8	7	2.505.800	2.759.100
9	8	2.567.300	2.835.400
10	9	2.567.300	2.835.400
11	10	2.630.400	2.913.900
12	11	2.630.400	2.913.900
13	12	2.694.900	2.994.400
14	13	2.694.900	2.994.400
15	14	2.761.100	3.077.300
16	15	2.761.100	3.077.300
17	16	2.828.900	3.162.400
18	17	2.828.900	3.162.400
19	18	2.898.300	3.249.800
20	19	2.898.300	3.249.800
21	20	2.969.500	3.339.700
22	21	2.969.500	3.339.700
23	22	3.042.400	3.432.100
24	23	3.042.400	3.432.100
25	24	3.117.100	3.527.000
26	25	3.117.100	3.527.000
27	26	3.193.600	3.624.500
28	27	3.193.600	3.624.500
29	28	3.272.100	3.724.800
30	29	3.272.100	3.724.800
31	30	3.352.400	3.827.800
32	31	3.352.400	3.827.800
33	32	3.434.700	3.933.600

## GOLONGAN RUANG IV/e

NO	MASA KERJA GOLONGAN DALAM	GAJI POKOK BERDASARKAN LAMPIRAN	
		PP NO. 25 TAHUN 2010 (Rp)	PP NO. 11 TAHUN 2011 (Rp)
1	2	3	4
1	0	2.428.500	2.649.900
2	1	2.428.500	2.649.900
3	2	2.488.100	2.723.100
4	3	2.488.100	2.723.100
5	4	2.549.200	2.798.400
6	5	2.549.200	2.798.400
7	6	2.611.800	2.875.800
8	7	2.611.800	2.875.800
9	8	2.675.900	2.955.400
10	9	2.675.900	2.955.400
11	10	2.741.600	3.037.100
12	11	2.741.600	3.037.100
13	12	2.808.900	3.121.100
14	13	2.808.900	3.121.100
15	14	2.877.900	3.207.400
16	15	2.877.900	3.207.400
17	16	2.948.600	3.296.100
18	17	2.948.600	3.296.100
19	18	3.020.900	3.387.300
20	19	3.020.900	3.387.300
21	20	3.095.100	3.481.000
22	21	3.095.100	3.481.000
23	22	3.171.100	3.577.200
24	23	3.171.100	3.577.200
25	24	3.249.000	3.676.200
26	25	3.249.000	3.676.200
27	26	3.328.700	3.777.800
28	27	3.328.700	3.777.800
29	28	3.410.500	3.882.300
30	29	3.410.500	3.882.300
31	30	3.494.200	3.989.700
32	31	3.494.200	3.989.700
33	32	3.580.000	4.100.000


 KEPALA  
 BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA,  
 EDY TOPO ASHARI

LAMPIRAN I-e PERATURAN KEPALA BADAN  
KEPEGAWAIAN NEGARA  
NOMOR : 9 TAHUN 2011  
TANGGAL : 10 JUNI 2011

CONTOH :  
KEPUTUSAN PENYESUAIAN GAJI POKOK PNS

KEPUTUSAN ..... 1)  
NOMOR : ..... 2)  
TENTANG  
PENYESUAIAN GAJI POKOK PEGAWAI NEGERI SIPIL  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
....., 1)

Menimbang : bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2011 tentang Penyesuaian Gaji Pokok Pegawai Negeri Sipil Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2010 Ke Dalam Gaji Pokok Pegawai Negeri Sipil Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2011, perlu menetapkan keputusan penyesuaian gaji pokok Pegawai Negeri Sipil;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3980);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3098), sebagaimana telah tiga belas kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 24);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 164);

4. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2011 tentang Penyesuaian Gaji Pokok Pegawai Negeri Sipil Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2010 Ke Dalam Gaji Pokok Pegawai Negeri Sipil Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2011;

5. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 9 Tahun 2011 tentang Ketentuan Teknis Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2011 tentang Penyesuaian Gaji Pokok Pegawai Negeri Sipil Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2010 Ke Dalam Gaji Pokok Pegawai Negeri Sipil Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2011;

6. Keputusan ... Nomor ... tanggal ..... 3);

## MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Terhitung mulai tanggal 1 Januari 2011 menyesuaikan gaji pokok Pegawai Negeri Sipil/Calon Pegawai Negeri Sipil 4) sebagai berikut :

1	Nama		5)
2	NIP		6)
3	Tempat, tanggal, bulan, dan tahun lahir		7)
4	Pangkat, golongan ruang		8)
5	Masa kerja golongan	tahun bulan	9)
6	Gaji pokok lama	Rp.	10)
7	Gaji pokok baru	Rp.	11)
8	Masa Kerja golongan untuk kenaikan gaji berkala berikutnya	tahun bulan	12)
9	Jabatan		13)
10	Unit kerja		14)
11	Keterangan		15)

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Asli Keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di ..... 16)

pada tanggal ..... 17)

....., 18)

NIP. ....19)

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Kepala Badan Kepegawaian Negara Up. Deputi Bidang Informasi Kepegawaian;
2. Kepala Kantor Regional ....20); Badan Kepegawaian Negara di ..... 21);
3. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara/Pemegang Kas (PEKAS)/Biro/Bagian Keuangan ..... 22) di ..... 23);
4. Pembuat Daftar Gaji ..... 24); dan
5. .... 25)

## PETUNJUK PENGISIAN LAMPIRAN I-e

NO	NOMOR KODE	URAIAN
1	2	3
1	1)	Tulislah nama jabatan yang menetapkan keputusan penyesuaian gaji pokok.
2	2)	Tulislah nomor keputusan penyesuaian gaji pokok.
3	3)	Tulislah jika ada keputusan pendelegasian wewenang untuk menetapkan keputusan penyesuaian gaji pokok.
4	4)	Coret salah satu, PNS atau CPNS sesuai status kepegawaian yang bersangkutan.
5	5)	Tulislah nama yang bersangkutan.
6	6)	Tulislah NIP yang bersangkutan.
7	7)	Tulislah tempat, tanggal, bulan, dan tahun lahir yang bersangkutan sesuai keputusan pengangkatan pertama sebagai CPNS atau PNS.
8	8)	Tulislah pangkat, golongan ruang terakhir yang bersangkutan.
9	9)	Tulislah dengan angka tahun, bulan masa kerja golongan yang bersangkutan, pada tanggal 31 Desember 2010.
10	10)	Tulislah dengan angka besarnya gaji pokok lama yang bersangkutan.
11	11)	Tulislah dengan angka besarnya gaji pokok baru yang bersangkutan.
12	12)	Tulislah dengan angka tahun, bulan dengan cara menghitung selisih antara masa kerja golongan untuk kenaikan gaji berkala berikutnya dengan masa kerja yang dimiliki yang bersangkutan pada tanggal 31 Desember 2010.
13	13)	Tulislah nama jabatan yang bersangkutan.
14	14)	Tulislah unit kerja yang bersangkutan.
15	15)	Tulislah hal-hal yang dianggap perlu, yang berkaitan dengan keputusan penyesuaian gaji pokok. Misal, yang bersangkutan sedang menjalani hukuman disiplin, cuti diluar tanggungan negara, dan sebagainya.
16	16)	Tulislah nama tempat ditetapkannya keputusan penyesuaian gaji pokok.
17	17)	Tulislah tanggal, bulan, dan tahun ditetapkannya keputusan penyesuaian gaji pokok.
18	18)	Tulislah nama pejabat yang menandatangani keputusan penyesuaian gaji pokok.
19	19)	Tulislah NIP pejabat yang menandatangani keputusan penyesuaian gaji pokok.
20	20)	Tulislah dengan angka romawi, nomor kantor regional Badan Kepegawaian Negara yang bersangkutan.
21	21)	Tulislah nama tempat kantor Regional Badan Kepegawaian Negara yang bersangkutan.
22	22)	Tulislah nama instansi yang bersangkutan.
23	23)	Tulislah nama tempat Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN), PEKAS, Biro/Bagian Keuangan instansi yang bersangkutan.
24	24)	Tulislah nama instansi tempat yang bersangkutan bekerja.
25	25)	Tulislah Pejabat lain yang dianggap perlu.

LAMPIRAN I-f PERATURAN KEPALA BADAN  
KEPEGAWAIAN NEGARA  
NOMOR : 9 TAHUN 2011  
TANGGAL : 10 JUNI 2011

CONTOH :  
KEPUTUSAN PENDELEGASIAN WEWENANG  
UNTUK MENETAPKAN KEPUTUSAN  
PENYESUAIAN GAJI POKOK PNS

KEPUTUSAN ..... 1)  
NOMOR : ..... 2)  
TENTANG  
PENDELEGASIAN WEWENANG UNTUK MENETAPKAN KEPUTUSAN  
PENYESUAIAN GAJI POKOK PEGAWAI NEGERI SIPIL  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

....., 1)

Menimbang : a. bahwa untuk mempercepat pelaksanaan penyesuaian gaji pokok Pegawai Negeri Sipil menurut Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2010 ke dalam gaji pokok Pegawai Negeri Sipil menurut Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2011, perlu memberikan delegasi wewenang untuk menetapkan keputusan penyesuaian gaji pokok Pegawai Negeri Sipil;

b. .... 3)

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3980);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3098), sebagaimana telah tiga belas kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 24);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 164);

4. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2011 tentang Penyesuaian Gaji Pokok Pegawai Negeri Sipil Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2010 Ke Dalam Gaji Pokok Pegawai Negeri Sipil Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2011;

5. .... 4);

6. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 9 Tahun 2011 tentang Ketentuan Teknis Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2011 tentang Penyesuaian Gaji Pokok Pegawai Negeri Sipil Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2010 Ke Dalam Gaji Pokok Pegawai Negeri Sipil Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2011;

## MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Memberikan delegasi wewenang kepada ..... NIP ..... jabatan ..... 5) untuk menetapkan keputusan penyesuaian gaji pokok Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan ..... 6).

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Asli Keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di .....7)

pada tanggal ..... 8)

..... 9)

NIP. .... 10)

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan;
2. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara/Pemegang Kas (PEKAS)/ Biro/Bagian Keuangan ..... 11) di .....12); dan
3. ....13).

## PETUNJUK PENGISIAN LAMPIRAN I-f

NO	NOMOR KODE	URAIAN
1	2	3
1	1)	Tulislah nama jabatan yang menetapkan keputusan pendelegasian wewenang.
2	2)	Tulislah nomor keputusan pendelegasian wewenang.
3	3)	Tulislah konsiderans lain yang dianggap perlu.
4	4)	Tulislah dasar hukum peraturan perundang-undangan lain yang dianggap perlu.
5	5)	Tulislah nama, NIP, dan jabatan yang diberi delegasi wewenang.
6	6)	Tulislah instansi PNS yang disesuaikan gaji pokok.
7	7)	Tulislah nama tempat ditetapkannya keputusan pendelegasian wewenang.
8	8)	Tulislah tanggal, bulan, dan tahun ditetapkannya keputusan pendelegasian wewenang.
9	9)	Tulislah nama pejabat yang menandatangani keputusan pendelegasian wewenang.
10	10)	Tulislah NIP pejabat yang menandatangani keputusan pendelegasian wewenang.
11	11)	Tulislah nama instansi tempat yang bersangkutan bekerja.
12	12)	Tulislah nama tempat Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN), PEKAS, Biro/Bagian Keuangan instansi yang bersangkutan.
13	13)	Tulislah Pejabat lain yang dianggap perlu.

LAMPIRAN I-g PERATURAN KEPALA BADAN  
KEPEGAWAIAN NEGARA  
NOMOR : 9 TAHUN 2011  
TANGGAL : 10 JUNI 2011

CONTOH :  
KEPUTUSAN PENYESUAIAN GAJI POKOK PNS YANG  
DIJATUHI HUKUMAN DISIPLIN BERUPA PENURUNAN  
PANGKAT SETINGKAT LEBIH RENDAH

KEPUTUSAN ..... 1)

NOMOR : ..... 2)

TENTANG

PENYESUAIAN GAJI POKOK PNS YANG DIJATUHI HUKUMAN DISIPLIN  
BERUPA PENURUNAN PANGKAT SETINGKAT LEBIH RENDAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

....., 1)

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan ..... Nomor ..... tanggal ..... 3),  
Sdr. ....4) NIP. ....5), terhitung mulai tanggal ..... s/d tanggal ..... 6) telah  
dijatuhi hukuman disiplin berupa penurunan pangkat setingkat lebih rendah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu  
menyesuaikan gaji pokok Pegawai Negeri Sipil menurut Peraturan Pemerintah  
Nomor 25 Tahun 2010 ke dalam Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2011;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian  
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran  
Negara Republik Indonesia Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan  
Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia  
Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor  
3980);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri  
Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan  
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3098), sebagaimana telah tiga belas kali  
diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2011 (Lembaran  
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 24);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan,  
Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik  
Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia  
Nomor 4263), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63  
Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 164);
4. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2011 tentang Penyesuaian Gaji Pokok  
Pegawai Negeri Sipil Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2010 Ke  
Dalam Gaji Pokok Pegawai Negeri Sipil Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 11  
Tahun 2011;
5. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 9 Tahun 2011 tentang  
Ketentuan Teknis Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2011 tentang  
Penyesuaian Gaji Pokok Pegawai Negeri Sipil Menurut Peraturan Pemerintah Nomor  
25 Tahun 2010 Ke Dalam Gaji Pokok Pegawai Negeri Sipil Menurut Peraturan  
Pemerintah Nomor 11 Tahun 2011;
6. Keputusan ... Nomor ... tanggal ... 7);

## MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Terhitung mulai tanggal 1 Januari 2011 menyesuaikan gaji pokok Pegawai Negeri Sipil sebagai berikut :

1	Nama		4)
2	NIP		5)
3	Tempat, tanggal, bulan, dan tahun lahir		8)
4	Pangkat, golongan ruang		9)
5	Masa kerja golongan	Tahun bulan	10)
6	Gaji pokok lama	Rp.	11)
7	Gaji pokok baru	Rp.	12)
8	Jabatan		13)
9	Unit kerja		14)

KEDUA : Terhitung mulai tanggal ...., 15) gaji pokok Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU menjadi sebagai berikut :

1	Pangkat, golongan ruang		16)
2	Masa kerja golongan	Tahun bulan	17)
3	Gaji pokok lama	Rp.	18)
4	Gaji pokok baru	Rp.	19)
5	Masa Kerja golongan untuk kenaikan gaji berkala berikutnya	Tahun bulan	20)

KETIGA : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

Asli Keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di ..... 21)

pada tanggal .....22)

....., 1)

..... (23)

NIP. .... (24)

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Kepala Badan Kepegawaian Negara Up. Deputi Bidang Informasi Kepegawaian;
2. Kepala Kantor Regional ....25); Badan Kepegawaian Negara di ..... 26);
3. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara/Pemegang Kas (PEKAS)/Biro/Bagian Keuangan ..... 27) di ..... 28);
4. Pembuat Daftar Gaji ..... 29); dan
5. .... 30)

## PETUNJUK PENGISIAN LAMPIRAN I-g

NO	NOMOR KODE	URAIAN
1	2	3
1	1)	Tulislah nama jabatan yang menetapkan keputusan penyesuaian gaji pokok.
2	2)	Tulislah nomor keputusan penyesuaian gaji pokok.
3	3)	Tulislah nama jabatan, nomor dan tanggal keputusan hukuman disiplin.
4	4)	Tulislah nama PNS yang dijatuhi hukuman disiplin.
5	5)	Tulislah NIP PNS yang dijatuhi hukuman disiplin.
6	6)	Tulislah tanggal mulai berlaku dan berakhirnya hukuman disiplin.
7	7)	Tulislah jika ada keputusan pendelegasian wewenang untuk menetapkan keputusan penyesuaian gaji pokok.
8	8)	Tulislah tempat, tanggal, bulan, dan tahun lahir yang bersangkutan sesuai keputusan pengangkatan pertama sebagai CPNS atau PNS.
9	9)	Tulislah pangkat, golongan ruang pada tanggal 31 Desember 2010.
10	10)	Tulislah dengan angka tahun, bulan masa kerja golongan yang bersangkutan pada tanggal 31 Desember 2010.
11	11)	Tulislah dengan angka besarnya gaji pokok lama sesuai dengan golongan ruang dan masa kerja golongan pada tanggal 31 Desember 2010.
12	12)	Tulislah dengan angka besarnya gaji pokok baru sesuai dengan golongan ruang dan masa kerja golongan pada tanggal 31 Desember 2010.
13	13)	Tulislah nama jabatan yang bersangkutan.
14	14)	Tulislah nama unit kerja yang bersangkutan.
15	15)	Tulislah tanggal, bulan dan tahun dikembalikannya gaji pokok yang bersangkutan setelah berakhirnya hukuman disiplin.
16	16)	Tulislah pangkat, golongan ruang yang bersangkutan setelah dikembalikan pada pangkat semula, setelah selesai menjalani hukuman disiplin.
17	17)	Tulislah dengan angka tahun, bulan masa kerja golongan yang baru yang bersangkutan, setelah selesai menjalani hukuman disiplin.
18	18)	Tulislah dengan angka, besarnya gaji pokok lama berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2010 sesuai dengan golongan ruang dan masa kerja golongan setelah selesai menjalani hukuman disiplin.
19	19)	Tulislah dengan angka, besarnya gaji pokok baru berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2011 sesuai dengan golongan ruang dan masa kerja golongan setelah selesai menjalani hukuman disiplin.

20	20)	Tulislah dengan angka tahun, bulan dengan cara menghitung selisih antara selisih masa kerja golongan untuk kenaikan gaji berkala berikutnya dengan jumlah masa kerja yang dimiliki PNS yang bersangkutan pada tanggal 31 Desember 2010.
21	21)	Tulislah nama tempat ditetapkannya keputusan penyesuaian gaji pokok.
22	22)	Tulislah tanggal, bulan, dan tahun ditetapkannya keputusan penyesuaian gaji pokok.
23	23)	Tulislah nama pejabat yang menandatangani keputusan penyesuaian gaji pokok.
24	24)	Tulislah NIP pejabat yang menandatangani keputusan penyesuaian gaji pokok.
25	25)	Tulislah dengan angka romawi, nomor kantor regional Badan Kepegawaian Negara yang bersangkutan.
26	26)	Tulislah nama tempat kantor Regional Badan Kepegawaian Negara yang bersangkutan.
27	27)	Tulislah nama instansi yang bersangkutan.
28	28)	Tulislah nama tempat Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN), PEKAS, Biro/Bagian Keuangan instansi yang bersangkutan.
29	29)	Tulislah nama instansi tempat yang bersangkutan bekerja.
30	30)	Tulislah Pejabat lain yang dianggap perlu.

LAMPIRAN II-a : PERATURAN KEPALA BADAN  
KEPEGAWAIAN NEGARA  
NOMOR : 9 TAHUN 2011  
TANGGAL : 10 JUNI 2011

DAFTAR PENYESUAIAN GAJI POKOK CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL  
MENURUT PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 25 TAHUN 2010  
KE DALAM PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 11 TAHUN 2011

GOLONGAN RUANG I/a DAN GOLONGAN RUANG I/c

GOLONGAN RUANG I/a

NO	MASA KERJA GOLONGAN DALAM	GAJI POKOK BERDASARKAN LAMPIRAN	
		PP NO. 25 TAHUN 2010 (Rp)	PP NO. 11 TAHUN 2011 (Rp)
1	2	3	4
1	0	876.000	940.000
2	1	876.000	940.000
3	2	897.520	966.000
4	3	897.520	966.000
5	4	919.520	992.720
6	5	919.520	992.720
7	6	942.160	1.020.240
8	7	942.160	1.020.240
9	8	965.280	1.048.400
10	9	965.280	1.048.400
11	10	988.960	1.077.440
12	11	988.960	1.077.440
13	12	1.013.280	1.107.200
14	13	1.013.280	1.107.200
15	14	1.038.160	1.137.840
16	15	1.038.160	1.137.840
17	16	1.063.600	1.169.280
18	17	1.063.600	1.169.280
19	18	1.089.760	1.201.600
20	19	1.089.760	1.201.600
21	20	1.116.480	1.234.880
22	21	1.116.480	1.234.880
23	22	1.143.920	1.269.040
24	23	1.143.920	1.269.040
25	24	1.172.000	1.304.080
26	25	1.172.000	1.304.080
27	26	1.200.720	1.340.160
28	27	1.200.720	1.340.160

## GOLONGAN RUANG I/c

NO	MASA KERJA GOLONGAN DALAM	GAJI POKOK BERDASARKAN LAMPIRAN	
		PP NO. 25 TAHUN 2010 (Rp)	PP NO. 11 TAHUN 2011 (Rp)
1	2	3	4
1	0		
2	1		
3	2		
4	3	987.040	1.064.000
5	4	987.040	1.064.000
6	5	1.011.280	1.093.440
7	6	1.011.280	1.093.440
8	7	1.036.080	1.123.680
9	8	1.036.080	1.123.680
10	9	1.061.520	1.154.720
11	10	1.061.520	1.154.720
12	11	1.087.600	1.186.640
13	12	1.087.600	1.186.640
14	13	1.114.320	1.219.520
15	14	1.114.320	1.219.520
16	15	1.141.680	1.253.200
17	16	1.141.680	1.253.200
18	17	1.169.680	1.287.920
19	18	1.169.680	1.287.920
20	19	1.198.400	1.323.520
21	20	1.198.400	1.323.520
22	21	1.227.840	1.360.080
23	22	1.227.840	1.360.080
24	23	1.258.000	1.397.680
25	24	1.258.000	1.397.680
26	25	1.288.880	1.436.400
27	26	1.288.880	1.436.400
28	27	1.320.480	1.476.080


 KEPALA  
 BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA,  
 EDY TOPO ASHARI

LAMPIRAN II-b : PERATURAN KEPALA BADAN  
KEPEGAWAIAN NEGARA  
NOMOR : 9 TAHUN 2011  
TANGGAL : 10 JUNI 2011

DAFTAR PENYESUAIAN GAJI POKOK CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL  
MENURUT PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 25 TAHUN 2010  
KE DALAM PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 11 TAHUN 2011

GOLONGAN RUANG II/a SAMPAI DENGAN GOLONGAN RUANG II/c

GOLONGAN RUANG II/a

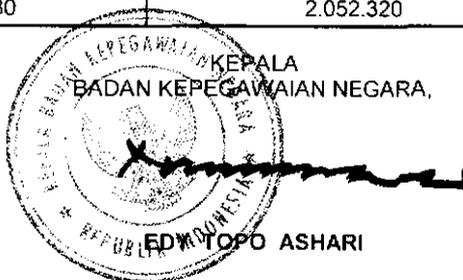
NO	MASA KERJA GOLONGAN DALAM	GAJI POKOK BERDASARKAN LAMPIRAN	
		PP NO. 25 TAHUN 2010 (Rp)	PP NO. 11 TAHUN 2011 (Rp)
1	2	3	4
1	0	1.112.080	1.204.320
2	1	1.125.760	1.220.960
3	2	1.125.760	1.220.960
4	3	1.153.440	1.254.720
5	4	1.153.440	1.254.720
6	5	1.181.680	1.289.440
7	6	1.181.680	1.289.440
8	7	1.210.720	1.325.120
9	8	1.210.720	1.325.120
10	9	1.240.480	1.361.760
11	10	1.240.480	1.361.760
12	11	1.270.880	1.399.440
13	12	1.270.880	1.399.440
14	13	1.302.080	1.438.080
15	14	1.302.080	1.438.080
16	15	1.334.080	1.477.840
17	16	1.334.080	1.477.840
18	17	1.366.880	1.518.720
19	18	1.366.880	1.518.720
20	19	1.400.400	1.560.720
21	20	1.400.400	1.560.720
22	21	1.434.800	1.603.920
23	22	1.434.800	1.603.920
24	23	1.470.000	1.648.240
25	24	1.470.000	1.648.240
26	25	1.506.080	1.693.840
27	26	1.506.080	1.693.840
28	27	1.543.040	1.740.720
29	28	1.543.040	1.740.720
30	29	1.580.960	1.788.880
31	30	1.580.960	1.788.880
32	31	1.619.760	1.838.320
33	32	1.619.760	1.838.320
34	33	1.659.520	1.889.120

## GOLONGAN RUANG II/b

NO	MASA KERJA GOLONGAN DALAM	GAJI POKOK BERDASARKAN LAMPIRAN	
		PP NO. 25 TAHUN 2010 (Rp)	PP NO. 11 TAHUN 2011 (Rp)
1	2	3	4
1	0		
2	1		
3	2		
4	3	1.202.160	1.307.840
5	4	1.202.160	1.307.840
6	5	1.231.680	1.344.000
7	6	1.231.680	1.344.000
8	7	1.261.920	1.381.120
9	8	1.261.920	1.381.120
10	9	1.292.960	1.419.360
11	10	1.292.960	1.419.360
12	11	1.324.640	1.458.560
13	12	1.324.640	1.458.560
14	13	1.357.200	1.498.960
15	14	1.357.200	1.498.960
16	15	1.390.480	1.540.400
17	16	1.390.480	1.540.400
18	17	1.424.640	1.582.960
19	18	1.424.640	1.582.960
20	19	1.459.600	1.626.800
21	20	1.459.600	1.626.800
22	21	1.495.440	1.671.760
23	22	1.495.440	1.671.760
24	23	1.532.160	1.718.000
25	24	1.532.160	1.718.000
26	25	1.569.840	1.765.520
27	26	1.569.840	1.765.520
28	27	1.608.320	1.814.320
29	28	1.608.320	1.814.320
30	29	1.647.840	1.864.480
31	30	1.647.840	1.864.480
32	31	1.688.320	1.916.080
33	32	1.688.320	1.916.080
34	33	1.729.760	1.969.040

## GOLONGAN RUANG II/c

NO	MASA KERJA GOLONGAN DALAM	GAJI POKOK BERDASARKAN LAMPIRAN	
		PP NO. 25 TAHUN 2010 (Rp)	PP NO. 11 TAHUN 2011 (Rp)
1	2	3	4
1	0		
2	1		
3	2		
4	3	1.253.040	1.363.120
5	4	1.253.040	1.363.120
6	5	1.283.840	1.400.800
7	6	1.283.840	1.400.800
8	7	1.315.360	1.439.600
9	8	1.315.360	1.439.600
10	9	1.347.600	1.479.360
11	10	1.347.600	1.479.360
12	11	1.380.720	1.520.320
13	12	1.380.720	1.520.320
14	13	1.414.640	1.562.320
15	14	1.414.640	1.562.320
16	15	1.449.360	1.605.520
17	16	1.449.360	1.605.520
18	17	1.484.960	1.649.920
19	18	1.484.960	1.649.920
20	19	1.521.360	1.695.600
21	20	1.521.360	1.695.600
22	21	1.558.720	1.742.480
23	22	1.558.720	1.742.480
24	23	1.597.040	1.790.640
25	24	1.597.040	1.790.640
26	25	1.636.240	1.840.160
27	26	1.636.240	1.840.160
28	27	1.676.400	1.891.120
29	28	1.676.400	1.891.120
30	29	1.717.520	1.943.360
31	30	1.717.520	1.943.360
32	31	1.759.680	1.997.120
33	32	1.759.680	1.997.120
34	33	1.802.880	2.052.320


  
 KEPALA  
 BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA,  
 EDY TOPO ASHARI

LAMPIRAN II-c : PERATURAN KEPALA BADAN  
KEPEGAWAIAN NEGARA  
NOMOR : 9 TAHUN 2011  
TANGGAL : 10 JUNI 2011

DAFTAR PENYESUAIAN GAJI POKOK CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL  
MENURUT PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 25 TAHUN 2010  
KE DALAM PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 11 TAHUN 2011  
GOLONGAN RUANG III/a SAMPAI DENGAN GOLONGAN RUANG III/c  
GOLONGAN RUANG III/a

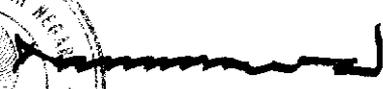
NO	MASA KERJA GOLONGAN DALAM	GAJI POKOK BERDASARKAN LAMPIRAN	
		PP NO. 25 TAHUN 2010 (Rp)	PP NO. 11 TAHUN 2011 (Rp)
1	2	3	4
1	0	1.394.720	1.521.840
2	1	1.394.720	1.521.840
3	2	1.428.960	1.563.920
4	3	1.428.960	1.563.920
5	4	1.464.080	1.607.200
6	5	1.464.080	1.607.200
7	6	1.500.000	1.651.600
8	7	1.500.000	1.651.600
9	8	1.536.800	1.697.280
10	9	1.536.800	1.697.280
11	10	1.574.560	1.744.240
12	11	1.574.560	1.744.240
13	12	1.613.200	1.792.480
14	13	1.613.200	1.792.480
15	14	1.652.800	1.842.080
16	15	1.652.800	1.842.080
17	16	1.693.360	1.893.040
18	17	1.693.360	1.893.040
19	18	1.734.960	1.945.360
20	19	1.734.960	1.945.360
21	20	1.777.600	1.999.200
22	21	1.777.600	1.999.200
23	22	1.821.200	2.054.480
24	23	1.821.200	2.054.480
25	24	1.865.920	2.111.280
26	25	1.865.920	2.111.280
27	26	1.911.760	2.169.680
28	27	1.911.760	2.169.680
29	28	1.958.640	2.229.680
30	29	1.958.640	2.229.680
31	30	2.006.720	2.291.360
32	31	2.006.720	2.291.360
33	32	2.056.000	2.354.720

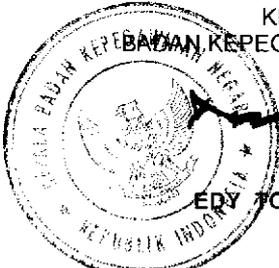
## GOLONGAN RUANG III/b

NO	MASA KERJA GOLONGAN DALAM	GAJI POKOK BERDASARKAN LAMPIRAN	
		PP NO.25 TAHUN 2010 (Rp)	PP NO. 11 TAHUN 2011 (Rp)
1	2	4	6
1	0	1.453.680	1.586.240
2	1	1.453.680	1.586.240
3	2	1.489.440	1.630.080
4	3	1.489.440	1.630.080
5	4	1.526.000	1.675.200
6	5	1.526.000	1.675.200
7	6	1.563.440	1.721.520
8	7	1.563.440	1.721.520
9	8	1.601.840	1.769.120
10	9	1.601.840	1.769.120
11	10	1.641.120	1.818.000
12	11	1.641.120	1.818.000
13	12	1.681.440	1.868.320
14	13	1.681.440	1.868.320
15	14	1.722.720	1.920.000
16	15	1.722.720	1.920.000
17	16	1.765.040	1.973.120
18	17	1.765.040	1.973.120
19	18	1.808.320	2.027.680
20	19	1.808.320	2.027.680
21	20	1.852.720	2.083.760
22	21	1.852.720	2.083.760
23	22	1.898.240	2.141.360
24	23	1.898.240	2.141.360
25	24	1.944.880	2.200.560
26	25	1.944.880	2.200.560
27	26	1.992.560	2.261.440
28	27	1.992.560	2.261.440
29	28	2.041.520	2.324.000
30	29	2.041.520	2.324.000
31	30	2.091.680	2.388.240
32	31	2.091.680	2.388.240
33	32	2.142.960	2.454.320

## GOLONGAN RUANG III/c

NO	MASA KERJA GOLONGAN DALAM	GAJI POKOK BERDASARKAN LAMPIRAN	
		PP NO. 25 TAHUN 2010 (Rp)	PP NO. 11 TAHUN 2011 (Rp)
1	2	4	6
1	0	1.515.200	1.653.280
2	1	1.515.200	1.653.280
3	2	1.552.400	1.699.040
4	3	1.552.400	1.699.040
5	4	1.590.480	1.746.000
6	5	1.590.480	1.746.000
7	6	1.629.600	1.794.320
8	7	1.629.600	1.794.320
9	8	1.669.600	1.843.920
10	9	1.669.600	1.843.920
11	10	1.710.560	1.894.960
12	11	1.710.560	1.894.960
13	12	1.752.560	1.947.360
14	13	1.752.560	1.947.360
15	14	1.795.600	2.001.200
16	15	1.795.600	2.001.200
17	16	1.839.680	2.056.560
18	17	1.839.680	2.056.560
19	18	1.884.880	2.113.440
20	19	1.884.880	2.113.440
21	20	1.931.120	2.171.840
22	21	1.931.120	2.171.840
23	22	1.978.560	2.231.920
24	23	1.978.560	2.231.920
25	24	2.027.120	2.293.680
26	25	2.027.120	2.293.680
27	26	2.076.880	2.357.120
28	27	2.076.880	2.357.120
29	28	2.127.840	2.422.240
30	29	2.127.840	2.422.240
31	30	2.180.160	2.489.280
32	31	2.180.160	2.489.280
33	32	2.233.680	2.558.080

KEPALA  
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA,  
  
EDY TOPO ASHARI





PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN III PERATURAN KEPALA BADAN  
KEPEGAWAIAN NEGARA  
NOMOR : 9 TAHUN 2011  
TANGGAL : 10 JUNI 2011

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 11 TAHUN 2011

TENTANG

PERUBAHAN KETIGABELAS ATAS  
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 7 TAHUN 1977 TENTANG  
PERATURAN GAJI PEGAWAI NEGERI SIPIL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan daya guna dan hasil guna serta kesejahteraan Pegawai Negeri Sipil, perlu mengubah gaji pokok Pegawai Negeri Sipil sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2010 tentang Perubahan Keduabelas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Perubahan Ketigabelas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil;
- Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
3. Peraturan . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

3. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3098) sebagaimana telah duabelas kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 31);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PERUBAHAN KETIGABELAS ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 7 TAHUN 1977 TENTANG PERATURAN GAJI PEGAWAI NEGERI SIPIL.

Pasal I

1. Mengubah Lampiran II Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3098) sebagaimana telah duabelas kali diubah dengan Peraturan Pemerintah:
  - a. Nomor 13 Tahun 1980 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3162);
  - b. Nomor 15 Tahun 1985 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 21);
  - c. Nomor 51 Tahun 1992 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 90);
  - d. Nomor ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

- d. Nomor 15 Tahun 1993 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 21);
- e. Nomor 6 Tahun 1997 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 19);
- f. Nomor 26 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 49);
- g. Nomor 11 Tahun 2003 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 17);
- h. Nomor 66 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 151);
- i. Nomor 9 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 25);
- j. Nomor 10 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 23);
- k. Nomor 8 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 21); dan
- l. Nomor 25 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 31),

sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Pemerintah ini.

- 2. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 1 berlaku sejak tanggal 1 Januari 2011.

## Pasal II

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 16 Februari 2011

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 16 Februari 2011

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

PATRIALIS AKBAR

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2011 NOMOR 24

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT NEGARA RI

Kepala Biro Peraturan Perundang-undangan,

Bidang Politik dan Kesejahteraan Rakyat,



Wisnu Setiawan



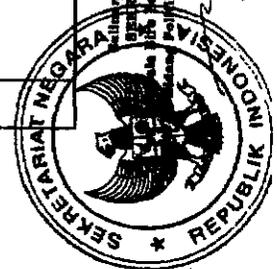
**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

LAMPIRAN  
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA  
: 11 TAHUN 2011  
NOMOR  
: 16 FEBRUARI 2011

**DAFTAR GAJI POKOK PROWAI NEGASI SIPIL**

MKG	GOLONGAN I			GOLONGAN II			GOLONGAN III			GOLONGAN IV			
	a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	
0	1.175.000												
1	1.207.500	1.276.000	1.330.000	1.386.300									
2	1.240.900	1.311.300	1.366.800	1.424.600									
3	1.275.300	1.347.600	1.404.600	1.464.000									
4	1.310.500	1.384.800	1.443.400	1.504.300									
5	1.346.800	1.422.100	1.483.300	1.546.100	1.776.000	1.776.000							
6	1.384.000	1.462.500	1.524.400	1.586.900	1.825.100	1.825.100	1.982.800	2.056.500	2.154.100	2.245.200	2.340.200	2.439.100	2.542.300
7	1.422.300	1.503.000	1.566.500	1.632.800	1.726.400	1.726.400	1.954.900	2.037.600	2.113.600	2.207.300	2.404.900	2.506.600	2.612.600
8	1.461.600	1.544.500	1.609.900	1.677.900	1.774.200	1.774.200	2.009.000	2.094.000	2.182.500	2.274.900	2.471.400	2.575.900	2.684.900
9	1.502.000	1.587.200	1.654.400	1.724.400	1.823.200	1.823.200	2.064.500	2.151.900	2.242.900	2.337.800	2.539.700	2.647.200	2.759.100
10	1.543.600	1.631.100	1.700.100	1.772.000	1.873.700	1.873.700	2.121.600	2.211.400	2.304.900	2.402.400	2.619.000	2.720.400	2.835.400
11	1.586.300	1.676.200	1.747.100	1.821.100	1.925.500	1.925.500	2.180.300	2.272.500	2.368.700	2.468.900	2.694.000	2.795.600	2.913.900
12	1.630.100	1.722.600	1.795.500	1.871.400	1.978.700	1.978.700	2.240.600	2.335.400	2.434.200	2.537.100	2.872.900	2.974.800	3.097.400
13	1.675.200	1.770.200	1.846.100	1.923.200	2.033.800	2.033.800	2.296.600	2.392.400	2.494.200	2.601.000	2.946.500	3.048.400	3.162.400
14					2.089.700	2.089.700	2.356.300	2.456.400	2.560.700	2.669.400	2.924.000	3.026.900	3.142.000
15					2.147.500	2.147.500	2.414.700	2.514.800	2.618.900	2.727.000	3.081.000	3.184.900	3.301.000
16					2.206.900	2.206.900	2.474.000	2.574.100	2.678.200	2.790.300	3.144.400	3.248.300	3.366.400
17					2.267.900	2.267.900	2.533.300	2.633.400	2.737.500	2.845.600	3.208.600	3.312.500	3.431.600
18					2.330.600	2.330.600	2.593.000	2.693.100	2.797.200	2.905.300	3.270.800	3.374.700	3.494.800
19					2.395.100	2.395.100	2.658.500	2.758.600	2.862.700	2.970.800	3.333.000	3.436.900	3.557.000
20					2.461.400	2.461.400	2.725.800	2.825.900	2.929.000	3.037.100	3.395.300	3.499.200	3.620.300
21					2.529.900	2.529.900	2.794.100	2.894.200	2.997.300	3.105.400	3.457.600	3.561.500	3.682.600
22					2.600.300	2.600.300	2.864.500	2.964.600	3.067.700	3.175.800	3.519.900	3.623.800	3.744.900
23					2.672.600	2.672.600	2.935.900	3.036.000	3.139.100	3.247.200	3.582.200	3.686.100	3.807.200
24					2.746.800	2.746.800	3.008.300	3.108.400	3.211.500	3.319.600	3.645.500	3.749.400	3.870.500
25					2.822.900	2.822.900	3.081.700	3.181.800	3.284.900	3.393.000	3.709.800	3.813.700	3.934.800
26					2.900.900	2.900.900	3.156.100	3.256.200	3.359.300	3.467.400	3.774.100	3.878.000	4.009.100
27					2.980.800	2.980.800	3.231.500	3.331.600	3.434.700	3.542.800	3.838.200	3.942.100	4.073.200
28					3.062.600	3.062.600	3.307.900	3.408.000	3.511.100	3.619.200	3.903.600	4.007.500	4.138.600
29					3.146.400	3.146.400	3.385.300	3.485.400	3.588.500	3.696.600	3.981.000	4.085.900	4.227.000
30					3.232.200	3.232.200	3.463.700	3.563.800	3.666.900	3.775.000	4.060.400	4.164.300	4.307.400
31					3.319.900	3.319.900	3.543.100	3.643.200	3.746.300	3.854.400	4.140.800	4.244.700	4.385.800
32					3.409.500	3.409.500	3.623.500	3.723.600	3.826.700	3.934.800	4.222.200	4.326.100	4.467.200
33					3.500.900	3.500.900	3.704.900	3.805.000	3.908.100	4.016.200	4.305.600	4.407.000	4.548.600

Mencanangkan sesuai dengan selang  
KEBUDHAYAAN NEGARA RI  
Menteri Koordinator Bidang  
Perencanaan Pembangunan Nasional  
dan Kesejahteraan Rakyat,



Wisanu Setiawan

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN IV PERATURAN KEPALA BADAN  
KEPEGAWAIAN NEGARA  
NOMOR : 9 TAHUN 2011  
TANGGAL : 10 JUNI 2011

**PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 27 TAHUN 2011  
TENTANG  
PENYESUAIAN GAJI POKOK PEGAWAI NEGERI SIPIL  
MENURUT PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 25 TAHUN 2010  
KE DALAM GAJI POKOK PEGAWAI NEGERI SIPIL MENURUT  
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 11 TAHUN 2011**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,**

**Menimbang** : bahwa dengan ditetapkannya gaji pokok Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2011, perlu mengatur penyesuaian gaji pokok Pegawai Negeri Sipil menurut Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2010 ke dalam gaji pokok Pegawai Negeri Sipil menurut Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2011;

**Mengingat** : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

3. Peraturan ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

3. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3098) sebagaimana telah tigabelas kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 24);

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN PRESIDEN TENTANG PENYESUAIAN GAJI POKOK PEGAWAI NEGERI SIPIL MENURUT PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 25 TAHUN 2010 KE DALAM GAJI POKOK PEGAWAI NEGERI SIPIL MENURUT PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 11 TAHUN 2011.**

**Pasal 1**

- (1) Gaji pokok Pegawai Negeri Sipil menurut golongan ruang dan masa kerja golongan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2010, terhitung mulai tanggal 1 Januari 2011 disesuaikan dengan gaji pokok menurut golongan ruang dan masa kerja golongan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2011.
- (2) Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1), termasuk Calon Pegawai Negeri Sipil.

(3) Rincian ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

- (3) Rincian penyesuaian gaji pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I sampai dengan Lampiran IV Peraturan Presiden ini.

#### **Pasal 2**

- (1) Penyesuaian gaji pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, ditetapkan dengan Keputusan Pejabat Pembina Kepegawaian dalam lingkungan masing-masing sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan keputusan dapat mendelegasikan wewenangnya kepada pejabat lain di lingkungannya untuk menetapkan penyesuaian gaji pokok tersebut.

#### **Pasal 3**

Ketentuan teknis pelaksanaan Peraturan Presiden ini diatur lebih lanjut oleh Menteri Keuangan dan/atau Kepala Badan Kepegawaian Negara, baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri menurut bidang tugasnya masing-masing.

#### **Pasal 4**

Pada saat Peraturan Presiden ini mulai berlaku, Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2010 tentang Penyesuaian Gaji Pokok Pegawai Negeri Sipil Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2009 Ke Dalam Gaji Pokok Pegawai Negeri Sipil Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2010, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

**Pasal 5 ...**



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

**Pasal 5**

Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 9 Mei 2011

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Salinan sesuai dengan aslinya

Deputi Bidang Kesejahteraan Rakyat  
Sekretariat Kabinet



Agus Sumartono, S.H.,M.H.



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN I  
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR : 27 TAHUN 2011  
TANGGAL : 9 Mei 2011

DAFTAR PENYESUAIAN GAJI POKOK PEGAWAI NEGERI SIPIL  
MENURUT PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 25 TAHUN 2010  
KE DALAM PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 11 TAHUN 2011

Golongan I								
MKG	a		b		c		d	
	Lama	Baru	Lama	Baru	Lama	Baru	Lama	Baru
0	1.095.000	1.175.000						
1								
2	1.121.900	1.207.500						
3			1.183.700	1.276.000	1.233.800	1.330.000	1.286.000	1.386.300
4	1.149.400	1.240.900						
5			1.212.800	1.311.300	1.264.100	1.366.800	1.317.500	1.424.600
6	1.177.700	1.275.300						
7			1.242.600	1.347.600	1.295.100	1.404.600	1.349.900	1.464.000
8	1.206.600	1.310.500						
9			1.273.100	1.384.800	1.326.900	1.443.400	1.383.000	1.504.500
10	1.236.200	1.346.800						
11			1.304.300	1.423.100	1.359.500	1.483.300	1.417.000	1.546.100
12	1.266.600	1.384.000						
13			1.336.300	1.462.500	1.392.900	1.524.400	1.451.800	1.588.900
14	1.297.700	1.422.300						
15			1.369.100	1.503.000	1.427.100	1.566.500	1.487.400	1.632.800
16	1.329.500	1.461.600						
17			1.402.800	1.544.500	1.462.100	1.609.900	1.523.900	1.677.900
18	1.362.200	1.502.000						
19			1.437.200	1.587.200	1.498.000	1.654.400	1.561.400	1.724.400
20	1.395.600	1.543.600						
21			1.472.500	1.631.100	1.534.800	1.700.100	1.599.700	1.772.000
22	1.429.900	1.586.300						
23			1.508.600	1.676.200	1.572.500	1.747.100	1.639.000	1.821.100



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

Golongan I								
MKG	a		b		c		d	
	Lama	Baru	Lama	Baru	Lama	Baru	Lama	Baru
24	1.465.000	1.630.100						
25			1.545.700	1.722.600	1.611.100	1.795.500	1.679.200	1.871.400
26	1.500.900	1.675.200						
27			1.583.600	1.770.200	1.650.600	1.845.100	1.720.400	1.923.200

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Salinan sesuai dengan aslinya  
Deputi Bidang Kesejahteraan Rakyat  
Sekretariat Kabinet



Agus Sumartono, S.H., M.H.



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN II  
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR : 27 TAHUN 2011  
TANGGAL : 9 Mei 2011

DAFTAR PENYESUAIAN GAJI POKOK PEGAWAI NEGERI SIPIL  
MENURUT PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 25 TAHUN 2010  
KE DALAM PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 11 TAHUN 2011

Golongan II								
MKG	a		b		c		d	
	Lama	Baru	Lama	Baru	Lama	Baru	Lama	Baru
0	1.390.100	1.505.400						
1	1.407.200	1.526.200						
2								
3	1.441.800	1.568.400	1.502.700	1.634.800	1.566.300	1.703.900	1.632.600	1.776.000
4								
5	1.477.100	1.611.800	1.539.600	1.680.000	1.604.800	1.751.000	1.672.600	1.825.100
6								
7	1.513.400	1.656.400	1.577.400	1.726.400	1.644.200	1.799.500	1.713.700	1.875.600
8								
9	1.550.600	1.702.200	1.616.200	1.774.200	1.684.500	1.849.200	1.755.800	1.927.400
10								
11	1.588.600	1.749.300	1.655.800	1.823.200	1.725.900	1.900.400	1.798.900	1.980.800
12								
13	1.627.600	1.797.600	1.696.500	1.873.700	1.768.300	1.952.900	1.843.100	2.035.500
14								
15	1.667.600	1.847.300	1.738.100	1.925.500	1.811.700	2.006.900	1.888.300	2.091.800
16								
17	1.708.600	1.898.400	1.780.800	1.978.700	1.856.200	2.062.400	1.934.700	2.149.700
18								
19	1.750.500	1.950.900	1.824.500	2.033.500	1.901.700	2.119.500	1.982.200	2.209.100
20								
21	1.793.500	2.004.900	1.869.300	2.089.700	1.948.400	2.178.100	2.030.800	2.270.200
22								
23	1.837.500	2.060.300	1.915.200	2.147.500	1.996.300	2.238.300	2.080.700	2.333.000



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

Golongan II								
MKG	a		b		c		d	
	Lama	Baru	Lama	Baru	Lama	Baru	Lama	Baru
24								
25	1.882.600	2.117.300	1.962.300	2.206.900	2.045.300	2.300.200	2.131.800	2.397.500
26								
27	1.928.800	2.175.900	2.010.400	2.267.900	2.095.500	2.363.900	2.184.100	2.463.800
28								
29	1.976.200	2.236.100	2.059.800	2.330.600	2.146.900	2.429.200	2.237.700	2.532.000
30								
31	2.024.700	2.297.900	2.110.400	2.395.100	2.199.600	2.496.400	2.292.700	2.602.000
32								
33	2.074.400	2.361.400	2.162.200	2.461.300	2.253.600	2.565.400	2.349.000	2.674.000

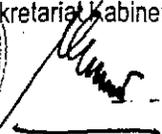
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO



Salinan sesuai dengan aslinya  
Deputi Bidang Kesejahteraan Rakyat  
Sekretariat Kabinet

  
Agus Sumartono, S.H.,M.H.



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN III  
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR : 27 TAHUN 2011  
TANGGAL : 9 Mei 2011

DAFTAR PENYESUAIAN GAJI POKOK PEGAWAI NEGERI SIPIL  
MENURUT PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 25 TAHUN 2010  
KE DALAM PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 11 TAHUN 2011

Golongan III								
MKG	a		b		c		d	
	Lama	Baru	Lama	Baru	Lama	Baru	Lama	Baru
0	1.743.400	1.902.300	1.817.100	1.982.800	1.894.000	2.066.600	1.974.100	2.154.100
1								
2	1.786.200	1.954.900	1.861.800	2.037.600	1.940.500	2.123.800	2.022.600	2.213.600
3								
4	1.830.100	2.009.000	1.907.500	2.094.000	1.988.100	2.182.500	2.072.200	2.274.900
5								
6	1.875.000	2.064.500	1.954.300	2.151.900	2.037.000	2.242.900	2.123.100	2.337.800
7								
8	1.921.000	2.121.600	2.002.300	2.211.400	2.087.000	2.304.900	2.175.300	2.402.400
9								
10	1.968.200	2.180.300	2.051.400	2.272.500	2.138.200	2.368.700	2.228.700	2.468.900
11								
12	2.016.500	2.240.600	2.101.800	2.335.400	2.190.700	2.434.200	2.283.400	2.537.100
13								
14	2.066.000	2.302.600	2.153.400	2.400.000	2.244.500	2.501.500	2.339.400	2.607.300
15								
16	2.116.700	2.366.300	2.206.300	2.466.400	2.299.600	2.570.700	2.396.900	2.679.400
17								
18	2.168.700	2.431.700	2.260.400	2.534.600	2.356.100	2.641.800	2.455.700	2.753.500
19								
20	2.222.000	2.499.000	2.315.900	2.604.700	2.413.900	2.714.800	2.516.000	2.829.700
21								
22	2.276.500	2.568.100	2.372.800	2.676.700	2.473.200	2.789.900	2.577.800	2.907.900
23								



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

Golongan III								
MKG	a		b		c		d	
	Lama	Baru	Lama	Baru	Lama	Baru	Lama	Baru
24	2.332.400	2.639.100	2.431.100	2.750.700	2.533.900	2.867.100	2.641.100	2.988.400
25								
26	2.389.700	2.712.100	2.490.700	2.826.800	2.596.100	2.946.400	2.705.900	3.071.000
27								
28	2.448.300	2.787.100	2.551.900	2.905.000	2.659.800	3.027.800	2.772.400	3.155.900
29								
30	2.508.400	2.864.200	2.614.600	2.985.300	2.725.200	3.111.600	2.840.400	3.243.200
31								
32	2.570.000	2.943.400	2.678.700	3.067.900	2.792.100	3.197.600	2.910.200	3.332.900

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO





PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN IV  
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR : 27 TAHUN 2011  
TANGGAL : 9 Mei 2011

DAFTAR PENYESUAIAN GAJI POKOK PEGAWAI NEGERI SIPIL  
MENURUT PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 25 TAHUN 2010  
KE DALAM PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 11 TAHUN 2011

MKG	a		b		c		d		e	
	Lama	Baru								
0	2.057.600	2.245.200	2.144.700	2.340.200	2.235.400	2.439.100	2.329.900	2.542.300	2.428.500	2.649.900
1										
2	2.108.100	2.307.300	2.197.300	2.404.900	2.290.300	2.506.600	2.387.100	2.612.600	2.488.100	2.723.100
3										
4	2.159.900	2.371.100	2.251.300	2.471.400	2.346.500	2.575.900	2.445.800	2.684.900	2.549.200	2.798.400
5										
6	2.212.900	2.436.700	2.306.500	2.539.700	2.404.100	2.647.200	2.505.800	2.759.100	2.611.800	2.875.800
7										
8	2.267.300	2.504.000	2.363.200	2.610.000	2.463.100	2.720.400	2.567.300	2.835.400	2.675.900	2.955.400
9										
10	2.322.900	2.573.300	2.421.200	2.682.100	2.523.600	2.795.600	2.630.400	2.913.900	2.741.600	3.037.100
11										
12	2.380.000	2.644.500	2.480.600	2.756.300	2.585.600	2.872.900	2.694.900	2.994.400	2.808.900	3.121.100
13										
14	2.438.400	2.717.600	2.541.500	2.832.600	2.649.000	2.952.400	2.761.100	3.077.300	2.877.900	3.207.400
15										
16	2.498.300	2.792.800	2.603.900	2.910.900	2.714.100	3.034.000	2.828.900	3.162.400	2.948.600	3.296.100
17										
18	2.559.600	2.870.000	2.667.900	2.991.400	2.780.700	3.117.900	2.898.300	3.249.800	3.020.900	3.387.300
19										
20	2.622.400	2.949.400	2.733.400	3.074.100	2.849.000	3.204.200	2.969.500	3.339.700	3.095.100	3.481.000
21										
22	2.686.800	3.030.900	2.800.500	3.159.100	2.918.900	3.292.800	3.042.400	3.432.100	3.171.100	3.577.200
23										



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

Golongan IV										
MKG	a		b		c		d		e	
	Lama	Baru								
24	2.752.800	3.114.800	2.869.200	3.246.500	2.990.600	3.383.800	3.117.100	3.527.000	3.249.000	3.676.200
25										
26	2.820.400	3.200.900	2.939.700	3.336.300	3.064.000	3.477.400	3.193.600	3.624.500	3.328.700	3.777.800
27										
28	2.889.600	3.289.400	3.011.900	3.428.600	3.139.300	3.573.600	3.272.100	3.724.800	3.410.500	3.882.300
29										
30	2.960.600	3.380.400	3.085.800	3.523.400	3.216.300	3.672.400	3.352.400	3.827.800	3.494.200	3.989.700
31										
32	3.033.300	3.473.900	3.161.600	3.620.800	3.295.300	3.774.000	3.434.700	3.933.600	3.580.000	4.100.000

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Salinan sesuai dengan aslinya  
Deputi Bidang Kesejahteraan Rakyat  
Sekretariat Kabinet



Agus Santono, S.H.,M.H.